



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PERTEMUAN WAKIL KETUA DPR RI/KORKESRA
DENGAN
KONSTITUEN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Pertemuan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : 13 Agustus 2021
Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Hotel Neo Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
Acara : Gus Muhaimin Mendegar Konstituen Provinsi Nusa Tenggara Timur
Ketua : Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra
Sekretaris Rapat : Susantomo S.I.P M.AP.
Hadir : **1. Pimpinan dan Anggota**
- Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI
- Cucun Syamsul Rijal (Ketua Fraksi),
- Dipo Nusantara (Anggota DPR)
- Edward Tannur (Anggota DPR)
2. Narasumber
- Taufan (Ketua Komunitas Petani NTT)
- Kaharudin (Tokoh Pemuda Kupang NTT)
3. Peserta Offline
- Abdullah Ulumando
- Kornelis
- Maryani
- Albertino Vinsensius
- Abdullah Ulumandu
- Abdul Muis
4. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Watua DPR RI/Korkesra
5. Staff

I. PENDAHULUAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.
3. Bahwa Anggota Dewan adalah pejabat *elected* sebagai pemegang amanah suara rakyat, wajib melakukan agregasi dan artikulasi terhadap kehendak dan aspirasi rakyat.
4. Bahwa Anggota DPR RI wajib memperjuangkan program pembangunan untuk daerah pemilihan.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pertemuan Wakil Ketua DPR RI dengan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan secara Hybrid (Virtual dan offline) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pertemuan tersebut dihadiri secara virtual maupun fisik terbatas oleh sejumlah Anggota DPRD Provinsi NTT, Anggota DPRD Kabupaten/Kota se NTT, PWNU NTT, Keuskupan Kota Kupang, tokoh adat, perwakilan RT se Kota Kupang, serikat buruh Kota Kupang, serta komunitas vespa Kota Kupang.

Pertanyaan Masyarakat NTT

Vaksinasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berlanjut. Namun tokoh masyarakat NTT sekaligus Sekretaris PWNU NTT, Abdullah Ulumando menyebut warga kesulitan mendapatkan vaksin lantaran akses yang terbatas. Bahwa perlu ada sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat. Memang distribusi vaksinnya sudah baik, tetapi pelayanannya yang kurang merata. Artinya apa, bahwa titik-titik pelayanannya yang masih kurang.

Minimnya lokasi vaksin itu, membuat antrean yang cukup panjang di setiap pelaksanaan vaksinasi. Bahkan di beberapa lokasi berujung ricuh, seperti yang terjadi di Poltekes Kupang, 14 Juli yang lalu. "Saran kami apa mungkin setiap DPC PKB membuka titik-titik untuk pelayanan vaksin kepada masyarakat bekerjasama dengan Kemenkes ataupun Dinkes setempat? Ini satu langkah strategis, pelayanan terhadap masyarakat.

Sementara itu, Perwakilan Buruh Kota Kupang, Kornelis, juga menyuarakan aspirasi. Dia ingin Wakil Ketua DPR RI/Korkesra turut memperjuangkan sektor perikanan dan pertanian di NTT yang tak luput dari terjangkit pandemi.

Menurut Kornelis, kondisi pertanian di NTT dan Jawa berbeda. Selain dari sisi geografis yang cenderung lebih lama musim kemaraunya, perhatian pemerintah kepada pertanian di NTT juga tidak sebesar petani Jawa. Kalau pertanian maju itu berarti dari bagian barat Indonesia, bukan dari NTT. Perhatian pemerintah masih minim buat kami, apalagi musim hujan di NTT hanya empat bulan.

Perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia Kota Kupang, Maryani mengutarakan aspirasi terkait persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT. Menurutnya sepanjang Covid-19 ada 40.200 PMI asal NTT dideportasi.

Tapi informasi yang kami terima tidak jelas, mungkin karena kurangnya sosialisasi. Mereka itu dipulangkan ternyata tidak secara serentak. Kami kesulitan untuk mendampingi. Karena sangat minim informasi. Saya minta Wakil Ketua DPR RI/Korkesra mendorong pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada kita, juga bagaimana menyikapi kondisi rekan-rekan kita.

Tanggapan Wakil Ketua DPR RI/Korkesra

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dengan tegas siap memperjuangkannya di DPR. Menurutnya vaksin adalah satu-satunya cara cepat mengurangi penularan Covid-19 sehingga aksesnya pun seharusnya diperbanyak. Tidak ada jalan lain kecuali melakukan vaksinasi dengan cepat. Yang bisa kita lakukan di DPR pertama mengawasi, dan saya minta kepada DPR-DPR juga untuk berkoordinasi dengan Komisi IX ataupun langsung kepada Menteri Kesehatan, Kepolisian dan TNI.

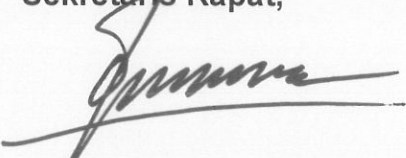
Wakil Ketua DPR RI/Korkesra mengakui salah satu titik lemah vaksinasi di Indonesia adalah lemahnya keterlibatan masyarakat. Selama ini vaksinasi sepenuhnya dihandle langsung oleh pemerintah dan memunculkan ketidakmaksimalan di daerah-daerah tertentu. Pemerintah memang sangat ideal, dalam artian ingin bekerja cepat sendiri, penanganan yang efektif (dan) ingin menjadi solusi yang efektif. Tapi ternyata tidak terjadi efektifitas karena tidak melibatkan secara massif partisipasi masyarakat.

Mendengar seluruh aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti. Di sisi lain Wakil Ketua DPR RI/Korkesra menyebut masalah-masalah itu memang menjadi perhatiannya di DPR, baik persoalan yang terkait dengan PMI, pertanian dan perikanan, serta vaksinasi.

III. PENUTUP

Pertemuan ditutup Pukul 14.15 WIB

**A.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,**



Susantomo, S.I.P. M.AP.